



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional dan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

Dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah berjumlah Rp 1.192.350.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. belanja Daerah berjumlah Rp 1.356.500.000.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan defisit sebesar Rp 164.150.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
- c. pembiayaan Daerah terdiri dari:
  1. Penerimaan berjumlah Rp 172.200.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  2. Pengeluaran berjumlah Rp 8.050.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Puluh Juta Rupiah);
  3. Pembiayaan netto berjumlah Rp 164.150.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
  4. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah).

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan Asli Daerah berjumlah Rp 105.869.332.988,00 (Seratus Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- b. pendapatan Transfer berjumlah Rp 1.066.948.485.575,00 (Satu Triliun Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berjumlah Rp 19.532.181.437,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pajak Daerah berjumlah Rp 35.847.445.100,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);
- b. retribusi Daerah berjumlah Rp 16.100.605.548,00 (Enam Belas Miliar Seratus Juta Enam Ratus Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berjumlah Rp 1.707.467.340,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah); dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berjumlah Rp 52.213.815.000,00 (Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat berjumlah Rp 1.032.717.423.000,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah berjumlah Rp 34.231.062.575,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. pendapatan Hibah berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah);
- b. dana darurat berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan berjumlah Rp 19.532.181.437,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

- a. belanja Operasi berjumlah Rp 971.422.173.512,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);
- b. belanja Modal berjumlah Rp 182.644.790.188,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- c. belanja Tidak Terduga berjumlah Rp 2.541.749.300,00 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah); dan
- d. belanja Transfer berjumlah Rp 199.891.287.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. belanja Pegawai berjumlah Rp 561.150.364.708,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah);
- b. belanja Barang dan Jasa berjumlah Rp 347.966.842.250,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- c. belanja Bunga berjumlah Rp 13.972.163.397,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- d. belanja Subsidi berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah);
- e. belanja Hibah berjumlah Rp 44.191.435.157,00 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah); dan
- f. belanja Bantuan Sosial berjumlah Rp 4.141.368.000,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- belanja Modal Tanah berjumlah Rp 845.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  - belanja Modal Peralatan dan Mesin berjumlah Rp 71.231.698.083,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah);
  - belanja Modal Bangunan dan Gedung berjumlah Rp 43.930.209.334,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
  - belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berjumlah Rp 66.637.882.771,00 (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
  - belanja Aset Tetap Lainnya berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah); dan
  - belanja Modal Aset Tidak Berwujud berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah Rp 2.541.749.300,00 ( Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- belanja bagi hasil berjumlah Rp 3.327.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah); dan
  - belanja bantuan keuangan berjumlah Rp 196.564.287.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan dokumen pelaksana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. penerimaan Pembiayaan Daerah berjumlah Rp 172.200.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah); dan

- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah berjumlah Rp 8.050.000.000,00 (Delapan Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya berjumlah Rp 172.200.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - b. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah); dan
  - c. penerimaan pinjaman daerah berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembentukan dana cadangan berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah);
  - b. penyertaan Modal Daerah berjumlah Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo berjumlah Rp 3.050.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. lampiran II berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III berisi rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV berisi rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

- e. lampiran V berisi rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah, fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. lampiran VI berisi rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. lampiran VII berisi Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. lampiran VIII berisi Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. lampiran IX berisi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X berisi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI berisi Daftar Piutang daerah;
- l. lampiran XII berisi Daftar penyertaan modal daerah;
- m. lampiran XIII berisi Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. lampiran XIV berisi Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. lampiran XV berisi Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI berisi Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 29 Desember 2022



KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

**KABUPATEN SIKKA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	105.869.332.988
4.1.01	Pajak Daerah	35.847.445.100
4.1.02	Retribusi Daerah	16.100.605.548
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.707.467.340
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.213.815.000
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.066.948.485.575
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.032.717.423.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.231.062.575
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	19.532.181.437
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.532.181.437
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.192.350.000.000</b>
5	<b>BELANJA</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	971.422.173.512
5.1.01	Belanja Pegawai	561.150.364.708
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.966.842.250
5.1.03	Belanja Bunga	13.972.163.397
5.1.05	Belanja Hibah	44.191.435.157
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.141.368.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	182.644.790.188
5.2.01	Belanja Modal Tanah	845.000.000

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.231.698.083
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.930.209.334
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.637.882.771
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.541.749.300
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.541.749.300
5.4	BELANJA TRANSFER	199.891.287.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.327.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	196.564.287.000
	Jumlah Belanja	1.356.500.000.000
	Total Surplus/(Defisit)	(164.150.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.200.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172.200.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	172.200.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.050.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.050.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.050.000.000
	Pembiayaan Netto	164.150.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Bupati Sikka

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

**KABUPATEN SIKKA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.542.181.437	605.585.386.804	170.929.181.993	0	0	776.514.568.797
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	285.953.848.066	19.364.610.450	0	0	305.318.458.516
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	284.955.302.950	19.364.610.450	0	0	304.319.913.400
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0001 SMP NEGERI 1 MAUMERE	0	31.177.240	0	0	0	31.177.240
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0002 SMP NEGERI 2 MAUMERE	0	30.395.999	0	0	0	30.395.999
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0003 SMP NEGERI 3 MAUMERE	0	31.184.175	0	0	0	31.184.175
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0005 SMP NEGERI 1 NITA	0	24.800.000	0	0	0	24.800.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0006 SMP NEGERI 2 NITA	0	22.400.000	0	0	0	22.400.000
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0007 SMP NEGERI 1 TALIBURA	0	23.599.900	0	0	0	23.599.900
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0008 SMP NEGERI 2 TALIBURA	0	22.395.745	0	0	0	22.395.745
1 01	1.01.0.00.0.00.01.0009 SMP NEGERI 1 KEWAPANTE	0	29.770.318	0	0	0	29.770.318

1	01	1.01.0.00.0.00.01.0010	SMP NEGERI 1 PAGA	0	23.583.110	0	0	0	23.583.110
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0011	SMP NEGERI 2 PAGA	0	22.391.110	0	0	0	22.391.110
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0012	SMP NEGERI 1 MEGO	0	22.387.078	0	0	0	22.387.078
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0013	SMP NEGERI 1 LELA	0	23.599.837	0	0	0	23.599.837
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0014	SMP NEGERI 1 BOLA	0	24.198.061	0	0	0	24.198.061
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0015	SMP NEGERI 2 BOLA	0	22.399.091	0	0	0	22.399.091
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0016	SMP NEGERI 2 MEGO	0	21.597.950	0	0	0	21.597.950
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0017	SMP NEGERI 3 PAGA	0	21.990.410	0	0	0	21.990.410
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0018	SMP NEGERI 1 WAIGETE	0	23.600.000	0	0	0	23.600.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0019	SMP NEGERI 1 PALUE	0	22.393.000	0	0	0	22.393.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0020	SMP NEGERI KEWAPANTE	0	28.599.927	0	0	0	28.599.927
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0021	SMP NEGERI ALOK TIMUR	0	28.530.028	0	0	0	28.530.028
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0022	SMP NEGERI 2 WAIGETE	0	22.329.210	0	0	0	22.329.210
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0023	SMP NEGERI REROROJA	0	22.339.556	0	0	0	22.339.556
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0024	SMP NEGERI MAPITARA	0	22.398.583	0	0	0	22.398.583
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0025	SMP NEGERI NUBA ARAT	0	22.398.445	0	0	0	22.398.445
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0026	SMP NEGERI PRUDA	0	22.396.745	0	0	0	22.396.745
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0027	SMP NEGERI ALOK	0	29.600.000	0	0	0	29.600.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0028	SMP NEGERI PIGANG	0	22.399.800	0	0	0	22.399.800
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0029	SMP NEGERI KOLISIA	0	22.399.865	0	0	0	22.399.865
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0030	SMP NEGERI HEBAR	0	22.386.880	0	0	0	22.386.880

1	01	1.01.0.00.0.00.01.0031	SMP NEGERI HAMAR	0	22.389.160	0	0	0	22.389.160
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0032	SMP NEGERI WERANG	0	22.391.856	0	0	0	22.391.856
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0033	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG	0	22.399.704	0	0	0	22.399.704
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0034	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG	0	19.338.362	0	0	0	19.338.362
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0035	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT	0	22.390.845	0	0	0	22.390.845
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0036	SMP NEGERI 3 WAIGETE	0	18.424.026	0	0	0	18.424.026
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0037	SMP NEGERI TANAH MERAH	0	17.634.515	0	0	0	17.634.515
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0038	SMP NEGERI HENGA	0	18.126.051	0	0	0	18.126.051
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0039	SMP NEGERI PEMANA	0	18.597.867	0	0	0	18.597.867
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0040	SMP NEGERI SATAP PAGA	0	19.337.859	0	0	0	19.337.859
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0041	SMP NEGERI SATAP BLORO	0	19.094.084	0	0	0	19.094.084
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0042	SMP NEGERI SATAP WARA	0	17.187.819	0	0	0	17.187.819
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0043	SMP NEGERI SATAP SUKUN	0	17.357.058	0	0	0	17.357.058
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0044	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA	0	17.038.861	0	0	0	17.038.861
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0045	SMP NEGERI SATAP MORO	0	17.194.986	0	0	0	17.194.986
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	72.042.181.437	247.405.955.052	83.557.691.764	0	0	330.963.646.816
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	72.042.181.437	162.681.688.887	53.833.304.713	0	0	216.514.993.600

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	PUSKESMAS BOGANATAR	0	1.087.445.132	36.173.700	0	0	1.123.618.832
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS WATUBAING	0	1.755.645.360	63.296.200	0	0	1.818.941.560
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS WAIGETE	0	2.298.803.782	116.832.415	0	0	2.415.636.197
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS TANARAWA	0	1.329.043.833	112.413.490	0	0	1.441.457.323
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS HEWOKLOANG	0	1.140.576.526	87.476.200	0	0	1.228.052.726
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS BERU	0	1.744.736.901	85.473.701	0	0	1.830.210.602
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KOPETA	0	1.432.855.408	116.460.062	0	0	1.549.315.470
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS WOLOMARANG	0	1.424.145.522	63.296.200	0	0	1.487.441.722
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS MAGEPANDA	0	1.335.854.775	107.002.931	0	0	1.442.857.706
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS NELE	0	936.838.487	55.536.900	0	0	992.375.387
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS KOTING	0	889.183.063	92.998.452	0	0	982.181.515
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS NITA	0	2.030.707.840	56.196.317	0	0	2.086.904.157
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS NANGA	0	1.258.745.548	88.854.000	0	0	1.347.599.548
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS PAGA	0	1.640.728.723	85.299.000	0	0	1.726.027.723
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS LEKEBAI	0	1.214.926.774	106.890.300	0	0	1.321.817.074
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS WOLOFEO	0	1.311.497.628	91.526.900	0	0	1.403.024.528
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS FEONDARI	0	956.125.403	76.442.956	0	0	1.032.568.359
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS BOLA	0	1.205.780.980	82.366.850	0	0	1.288.147.830
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS HABIBOLA	0	1.421.168.332	105.673.800	0	0	1.526.842.132
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS MAPITARA	0	1.080.259.642	95.501.700	0	0	1.175.761.342

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS TELUK	0	1.264.217.614	63.582.375	0	0	1.327.799.989
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS PALUE	0	927.598.573	92.104.100	0	0	1.019.702.673
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS TUANGGEO	0	882.575.438	83.387.600	0	0	965.963.038
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS WAIPARE	0	1.433.623.836	229.606.794	0	0	1.663.230.630
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	PUSKESMAS KEWAPANTE	0	1.338.838.826	66.836.250	0	0	1.405.675.076
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0030	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	0	51.382.342.219	27.463.157.858	0	0	78.845.500.077
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000	29.328.718.117	65.604.299.933	0	0	94.933.018.050
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000	29.328.718.117	65.604.299.933	0	0	94.933.018.050
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	27.704.359.568	1.967.460.603	0	0	29.671.820.171
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	0	27.704.359.568	1.967.460.603	0	0	29.671.820.171
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	9.482.944.015	400.297.243	0	0	9.883.241.258
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	0	5.272.450.156	0	0	0	5.272.450.156

1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	4.210.493.859	400.297.243	0	0	4.610.791.102
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	5.709.561.986	34.822.000	0	0	5.744.383.986
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	5.709.561.986	34.822.000	0	0	5.744.383.986
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.050.000.000	63.682.451.920	9.122.194.356	0	0	72.804.646.276
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	5.212.066.280	234.094.332	0	0	5.446.160.612
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	5.212.066.280	234.094.332	0	0	5.446.160.612
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	509.278.156	37.919.657	0	0	547.197.813
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	0	509.278.156	37.919.657	0	0	547.197.813
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	2.925.586.180	0	0	0	2.925.586.180
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	2.925.586.180	0	0	0	2.925.586.180
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN	0	215.000.000	850.000.000	0	0	1.065.000.000

		<b>BIDANG PERTANAHAN</b>						
2 10	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	0	215.000.000	850.000.000	0	0	1.065.000.000
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000	7.442.788.533	307.413.000	0	0	7.750.201.533
2 11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000	7.442.788.533	307.413.000	0	0	7.750.201.533
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	5.352.355.962	65.000.000	0	0	5.417.355.962
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	5.352.355.962	65.000.000	0	0	5.417.355.962
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	5.541.959.944	2.463.300	0	0	5.544.423.244
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	5.541.959.944	2.463.300	0	0	5.544.423.244
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	0	10.924.761.764	1.708.045.477	0	0	12.632.807.241

			KELUARGA BERENCANA						
2	14	2.03.2.14.0.00.02.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	0	10.924.761.764	1.708.045.477	0	0	12.632.807.241
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.550.000.000	5.840.550.388	0	0	0	5.840.550.388
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	1.550.000.000	5.840.550.388	0	0	0	5.840.550.388
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	250.000.000	3.240.614.085	7.413.000	0	0	3.248.027.085
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	250.000.000	3.240.614.085	7.413.000	0	0	3.248.027.085
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.300.000.000	6.701.682.373	1.027.750.000	0	0	7.729.432.373
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.300.000.000	6.701.682.373	1.027.750.000	0	0	7.729.432.373
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	450.000.000	4.134.789.293	1.809.687.718	0	0	5.944.477.011
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	450.000.000	4.134.789.293	1.809.687.718	0	0	5.944.477.011

		TERPADU SATU PINTU						
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0	1.673.171.000	653.981.000	0	0	2.327.152.000
2	19	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0	1.673.171.000	653.981.000	0	0	2.327.152.000
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	77.526.600	0	0	0	77.526.600
2	20	2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	77.526.600	0	0	0	77.526.600
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000
2	21	2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	470.105.500	0	0	0	470.105.500
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	470.105.500	0	0	0	470.105.500
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	222.779.400	2.400.967.972	0	0	2.623.747.372
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	222.779.400	2.400.967.972	0	0	2.623.747.372
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	3.162.436.462	17.458.900	0	0	3.179.895.362
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	3.162.436.462	17.458.900	0	0	3.179.895.362

3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.467.292.000	49.385.342.264	1.778.032.136	0	0	51.163.374.400	
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.000.000.000	10.389.340.559	876.453.636	0	0	11.265.794.195	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	3.000.000.000	10.389.340.559	876.453.636	0	0	11.265.794.195
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	150.000.000	4.962.034.177	40.000.000	0	0	5.002.034.177	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	150.000.000	4.962.034.177	40.000.000	0	0	5.002.034.177
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.317.292.000	31.828.240.900	0	0	0	31.828.240.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	1.317.292.000	31.828.240.900	0	0	0	31.828.240.900
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	861.273.300	557.641.000	0	0	1.418.914.300	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	861.273.300	557.641.000	0	0	1.418.914.300
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	1.265.061.128	303.937.500	0	0	1.568.998.628	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	1.265.061.128	303.937.500	0	0	1.568.998.628

3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	79.392.200	0	0	0	79.392.200
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	79.392.200	0	0	0	79.392.200
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	238.815.000	64.488.432.725	608.746.943	0	0	65.097.179.668
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	238.815.000	27.533.539.450	229.144.300	0	0	27.762.683.750
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	1.141.690.779	29.334.300	0	0	1.171.025.079
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	156.318.997	0	0	0	156.318.997
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	7.753.144.380	0	0	0	7.753.144.380
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	308.903.999	0	0	0	308.903.999
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PEREKONOMIAN	0	160.913.400	0	0	0	160.913.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN HUKUM	0	784.356.861	0	0	0	784.356.861
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN ORGANISASI	0	183.587.452	0	0	0	183.587.452
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN UMUM	0	4.879.027.584	199.810.000	0	0	5.078.837.584
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	0	159.021.160	0	0	0	159.021.160
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	355.851.656	0	0	0	355.851.656
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	11.650.723.182	0	0	0	11.650.723.182

4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	36.954.893.275	379.602.643	0	0	37.334.495.918
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	36.954.893.275	379.602.643	0	0	37.334.495.918
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.110.051.711.563	132.335.028.181	203.891.560	2.541.749.300	199.891.287.000	334.971.956.041
5	01		PERENCANAAN	250.000.000	7.885.109.967	5.038.600	0	0	7.890.148.567
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250.000.000	7.885.109.967	5.038.600	0	0	7.890.148.567
5	02		KEUANGAN	1.109.801.711.563	116.464.040.532	198.852.960	2.541.749.300	199.891.287.000	319.095.929.792
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.005.780.888	79.119.812.862	0	0	0	79.119.812.862
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0001	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1.066.948.485.575	29.222.163.397	0	2.541.749.300	199.891.287.000	231.655.199.697
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	35.847.445.100	8.122.064.273	198.852.960	0	0	8.320.917.233
5	03		KEPEGAWAIAN	0	6.015.224.432	0	0	0	6.015.224.432
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	0	6.015.224.432	0	0	0	6.015.224.432
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	79.999.900	0	0	0	79.999.900
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	0	79.999.900	0	0	0	79.999.900
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	1.890.653.350	0	0	0	1.890.653.350

5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	1.890.653.350	0	0	0	1.890.653.350
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	4.871.080.680	0	0	0	4.871.080.680
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	4.871.080.680	0	0	0	4.871.080.680
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	4.871.080.680	0	0	0	4.871.080.680
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	45.556.228.290	2.743.200	0	0	45.558.971.490
7	01		KECAMATAN	0	45.556.228.290	2.743.200	0	0	45.558.971.490
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN ALOK	0	3.833.691.430	0	0	0	3.833.691.430
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN MADAWAT	0	405.502.280	0	0	0	405.502.280
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN KABOR	0	401.223.874	0	0	0	401.223.874
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN NANGALIMANG	0	355.446.690	0	0	0	355.446.690
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN KOTA UNENG	0	371.774.257	0	0	0	371.774.257
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN ALOK BARAT	0	3.808.110.103	0	0	0	3.808.110.103
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN WURING	0	422.500.415	0	0	0	422.500.415
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	KELURAHAN HEWULI	0	319.702.887	0	0	0	319.702.887
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	KELURAHAN WAILITI	0	347.136.088	0	0	0	347.136.088
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0004	KELURAHAN WOLOMARANG	0	435.501.692	0	0	0	435.501.692
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN ALOK TIMUR	0	4.222.358.675	0	0	0	4.222.358.675
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0001	KELURAHAN WAIOTI	0	373.074.328	0	0	0	373.074.328
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0002	KELURAHAN NANGAMETING	0	363.010.626	0	0	0	363.010.626
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0003	KELURAHAN WAIROTANG	0	330.714.520	0	0	0	330.714.520

7	01	7.01.0.00.0.00.07.0004	KELURAHAN BERU	0	322.479.276	0	0	0	322.479.276
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0005	KELURAHAN KOTA BARU	0	386.096.543	0	0	0	386.096.543
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN BOLA	0	1.642.065.738	0	0	0	1.642.065.738
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN HEWOKLOANG	0	1.402.271.375	0	0	0	1.402.271.375
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN KANGAE	0	1.805.287.299	0	0	0	1.805.287.299
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KEWAPANTE	0	1.715.547.366	0	0	0	1.715.547.366
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KOTING	0	1.673.323.018	0	0	0	1.673.323.018
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN LELA	0	1.560.446.394	0	0	0	1.560.446.394
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN MAGEPANDA	0	1.496.902.811	0	0	0	1.496.902.811
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN MAPITARA	0	1.613.269.998	0	0	0	1.613.269.998
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN NELLE	0	1.307.583.629	0	0	0	1.307.583.629
7	01	7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN NITA	0	1.824.521.890	0	0	0	1.824.521.890
7	01	7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN PAGA	0	1.428.033.007	0	0	0	1.428.033.007
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN PALUE	0	1.699.285.040	0	0	0	1.699.285.040
7	01	7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN TALIBURA	0	1.754.138.539	0	0	0	1.754.138.539
7	01	7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN TANAWAWO	0	1.430.758.939	0	0	0	1.430.758.939
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN WAIBLAMA	0	1.659.151.527	0	0	0	1.659.151.527
7	01	7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN WAIGETE	0	1.792.912.954	0	0	0	1.792.912.954
7	01	7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN MEGO	0	1.731.051.225	2.743.200	0	0	1.733.794.425
7	01	7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN DORENG	0	1.321.353.857	0	0	0	1.321.353.857
8			UNSUR PEMERINTAHAN	0	5.518.222.648	0	0	0	5.518.222.648

			UMUM						
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.518.222.648	0	0	0	5.518.222.648
8	01	8.01.1.05.1.05.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.518.222.648	0	0	0	5.518.222.648
TOTAL				1.192.350.000.000	971.422.173.512	182.644.790.188	2.541.749.300	199.891.287.000	1.356.500.000.000

  
 Bupati Sikka  
 FRANSISKUS ROBERTO DIOGO